

## BAB IV

### PENUTUP

#### 4.1 Kesimpulan

Berdasarkan penelitian yang telah dilakukan oleh penulis, dapat disimpulkan bahwa memang benar adanya bahwa kebijakan anti-imigran Denmark yang menasar imigran muslim dari Kawasan Timur Tengah dan Afrika, khususnya negara Suriah disebabkan oleh adanya perubahan identitas Denmark dan sebagai bentuk dari adanya *xenophobia*, serta islamophobia terhadap imigran yang beragama muslim. Perubahan identitas Denmark yang dulunya terbuka dengan imigran bahkan menjadi negara yang mempelopori Konvensi 1951 mengenai imigran, kini menjadi negara dengan kebijakan mengenai imigran paling ketat di Kawasan Eropa.

Perubahan identitas ini dalam konsep *State Identity* terbukti berperan besar seiring dengan interaksi Denmark terhadap imigran selama lebih dari 20 tahun dan didorong dengan adanya tindakan kriminal oleh imigran yang berasal dari Kawasan Timur Tengah, serta adanya opini publik dan peristiwa *9/11* yang mengakibatkan munculnya *stereotype* terhadap imigran muslim dari Kawasan tersebut. Selain itu, adanya kebijakan anti-imigran dalam sudut pandang *Foreign Decision Making Process* juga berperan dalam proses pembentukan kebijakan imigrasi di Denmark. Hal ini terbukti dari adanya krisis pengungsi di tahun 2015, gejolak dari partai sayap kanan di Denmark yang menyebarkan anti-imigran, bahkan setelah pergantian pemerintahan yang baru yakni Mette Frederiksen dari partai Sosial Demokrat yang

mengeluarkan kebijakan “*zero asylum*” telah membuktikan bahwa Denmark mengeluarkan kebijakan anti-imigran yang paling ketat di wilayah Eropa kepada imigran dari wilayah Suriah atas dasar adanya perbedaan identitas, *stereotype*, kekhawatiran, serta faktor eksternal dan internal yang mempengaruhinya.

#### **4.2 Saran**

Penelitian ini menggunakan data sekunder yang masih terbatas dalam menjabarkan secara eksplisit mengenai data undang-undang imigrasi di Denmark. Selain itu, terdapat keterbatasan mengenai proses analisis seperti data opini publik dan tahap proses perumusan kebijakan di Denmark. Hal ini dikarenakan terbatasnya akses menuju web pemerintah Denmark, khususnya yang menyajikan data mengenai survey dan undang-undang mengenai imigrasi. Oleh karena itu, penulis ingin memberikan saran untuk peneliti selanjutnya agar dapat melakukan survey dan menjalin hubungan dengan lembaga terkait dan pemerintah Denmark guna mendapatkan data yang lebih konkrit untuk diteliti.

Selain itu, terdapat juga saran yang ditujukan kepada pemerintah Denmark untuk tidak pilih kasih terhadap imigran-imigran dari negara konflik, serta melakukan peninjauan kembali terhadap undang-undang yang sekiranya sangat tidak memihak kepada imigran, pengungsi, dan para pencari suaka yang akan melakukan imigrasi ke Denmark.